ABSTRAK

Analisis Pengembangan Bumdes Oleh Kepala Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bumdes Desa Panggung Lestari Kec. Sewon Kab. Bantul)

Amin Makruf, Ahmad Yunadi
Universitas Alma Ata
marufamin664@gmail.com

Peran pemerintah dengan adanya BUMDes di desa-desa Kabupaten Bantul lebih lanjut sangat di harapkan guna pengembangan atas apa yang telah ada, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 disebutkan bahwa pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUM desa yang ada, agar tetap dapat berproduksi dan tetap mampu menjadi sumber penggerak perekonomian masyarakat sekitar desa. Jika melihat bahwa keberadaan BUMDes yang ada di Desa Panggung Lestari Kec. Sewon bahwa keberadaan beberapa BUMDes tersebut berada pada kegiatan yang stagnan sehingga dibutuhkan suatu tritmen bagi pengelola BUMDes tersebut agar kembali pada kegiatan awal dari BUMDes sehingga peningkatan kualitas BUMdes dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat desa. Maka dari itu peran pemerintah dalam hal ini Pemkab Bantul untuk membina dan mengawasi BUMDes yang ada akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dan upaya yang diambil untuk menyelesaikan kendala tersebut dalam hal melakukan pembinaan, pengawasan, serta kesejahteraan terhadap desa pengelola BUMDesa di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, dilakukan di BUMDes Panggung Lestari Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukan adanya dampak yang signifikan akibat hadirnya BUMDes Panggung Lestari dari berbagai macam aspek salah satunya pada aspek sosial dan ekonomi.

Kata kunci: **Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, BUMDes, Ekonomi Islam**

ABSTRACT

Analysis of Bumdes Development in Improving Welfare and Community Empowerment in an Islamic Economic Perspective (Case Study of Bumdes in Panggung Lestari Village, Sewon District, Bantul Regency)

Amin Makruf, Ahmad Yunadi
Universitas Alma Ata
marufamin664@gmail.com

The role of the government with the existence of BUMDes in the villages of Bantul Regency is further expected for the development of what already exists, Regional Regulation (Perda) Number 3 of 2016 states that the government is obliged to provide guidance and supervision of existing village BUMs, so that they can continue to operate. produce and still be able to become a source of driving the economy of the community around the village. If you see that the existence of BUMDes in Panggung Lestari Village, Kec. Sewon said that the existence of several BUMDes were in stagnant activities so that a treatment was needed for the BUMDes managers to return to the initial activities of BUMDes so that improving the quality of BUMdes could have a big impact on village communities. Therefore, the role of the government, in this case the Bantul Regency Government, to foster and supervise existing BUMDes will be the focus of discussion in this study, as well as to find out what are the obstacles and the efforts taken to resolve these obstacles in terms of providing guidance, supervision, and welfare to the community. BUMDes management village in Sewon District, Bantul Regency. This study used descriptive qualitative method. Data collection was carried out using interviews, observation, and documentation methods, carried out at BUMDes Panggung Lestari, Panggungharjo Village, Sewon District, Bantul Regency, Yogyakarta. The results of this study indicate a significant impact due to the presence of BUMDes Panggung Lestari from various aspects, one of which is the social and economic aspects.

Keywords: **Community Empowerment, Community Welfare, BUMDes, Islamic Economy**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan bisnis pada era globalisasi sekarang ini menjadi lebih ketat, hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah lembaga-lembaga. Pengaruh Marketing Mix dan Tingkat Margin Lembaga keuangan merupakan jantung perekonomian suatu negara, karena peran dan fungsinya yang sangat penting yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara oleh karena itu sangat penting keberadaannya dalam suatu negara. Guna mewujudkan terciptanya kesejahteraan masyarakat pada hakekatnya yaitu mewujudkan kesejahtraan nasional yang meliputi pembangunan, keseimbangan, dan keselarasan dalam kehidupan di masyarakat. Keadilan sosial terjadi karena terwujudnya kesejahteraan ekonomi pada masyarakat yang terus menerus berkembang dengan baik dan keadilan sosial bisa terwujud jika semua kalangan dan lapisan-lapisan masyarakat menyadari bahwa perataan ekonomi sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan sosial (Anton et al., 2019).

Kemiskinan menjadi sesuatu yang akrab dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan adalah salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan, khususnya di bidang ekonomi. Lembaga keuangan merupakan jantung perekonomian suatu negara, karena peran dan fungsinya yang sangat

penting yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara oleh karena itu sangat penting keberadaannya dalam suatu negara(Sujono & Wibowo, 2020). Penanggulangan kemiskinan menjadi bahasan paling penting dalam perbaikan negara(Kamal & Wulandari, 2018). Islam sebagai *Ad-diin* telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat (Salam & Risnawati, 2019).

Sebagai satuan politik pemerintahan terkecil, desa memiliki posisi stategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, akan tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan (Anton et al., 2019). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah

desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan (Agunggunanto et al., 2016).

BUMDes merupakan suatu badan atau lembaga perekonomian Desa yang berbadan hukum, dibentuk, dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, kemudian dikelola secara ekonomis mandiri dan professional dengan modal sebagian besar merupakan kekayaan Desa atau pendapatan Desa (Dewi, 2014). Menurut Dewi (2014) BUMDes pada akhirnya dibentuk dengan tujuan memperoleh pendapatan atau keuntungan yang berguna untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes) (Dewi, 2014).

Keberadaan BUMDes sangat strategis, mengingat bahwa pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan kata lain, harapan adanya BUMDes adalah pembentukan usaha baru yang bersumber dari sumber daya yang ada, serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang telah berjalan. Di sisi lain pada jangka waktu tertentu akan terjadi peningkatan dan kesempatan berusaha dalam rangka mengurangi pengangguran dan memperkuat otonomi Desa (Dewi, 2014).

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa menempatkan pemerintah desa, membangun desa,

pembinaan kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila (A. Prasetyo & Muis, 2015). Pemerintah sangat berperan dalam pembangunan desa agar sumber daya desa bisa dimanfaatkan dengan baik karena adanya sumber daya manusia yang mampu mengelola semua aset untuk menggerakan perekonomian masyarakat. Padahal ADD yang diberikan pemerintah kepada desa cukup besar dan kurangnya partisipasi masyarakat dan pemerintah desa sangatlah kurang maksimal. Maka dari itu, pemerintah membentuk lembaga BUMDes yang bertujuan untuk menampung kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional. Namun, tetap menganut berdasarkan potensi pada desa itu sendiri (A. Prasetyo & Muis, 2015). Dalam hal ini masyarakat biasa menjadikan bidang usahanya lebih produktif dan efisien. Selanjutnya BUMDes akan berfungsi sebagai rujukan untuk menjadikan kemandirian masyarakat dan sekaligus menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai sumber daya desa tersebut yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut Dewi (2014) tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan aset-aset desa, memajukan prekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan, kemudian sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan berkeadilan (Dewi, 2014).

Masyarakat belum mampu menyesuaikan diri dengan adanya BUMDes dikarenakan masyarakat kurang memiliki skill dalam bidang memanajemen dan tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung untuk menjalankan kegiatan BUMDes. Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa ini sangat mendorong masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dan memenuhi pelayanan kepada masyarakat untuk menggerakan aset-aset ekonomi desa dan adanya BUMDes, yaitu menjadi lembaga yang memunculkan pundi-pundi ekonomi masyarakat. Saat ini keadaan yang terjadi di desa-desa seperti kuranganya kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi pada masyarakat masih sangat rendah dikarenakan masyarakat bekerja sebagai cocok tanam, buruh, pedagang, sehingga pengembangan desa sangat ketergantungan dengan adanya anggaran dana desa (ADD), Masyarakat masih sangat kurang dalam berpastisipasi kepada desanya sendiri, dan kurangnya pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengembangkan BUMDes, sebagai badan usaha milik desa (BUMDes) (Kirowati & Setia, 2018).

Menurut Mulia & Saputra (2020) kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan

keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif (Mulia & Saputra, 2020).

Menurut Adams dalam Sany (2019) pemberdayaan masyarakat merupakan cara dan metode yang digunakan individu, kelompok atau masyarakat dengan tujuan mampu mengelola lingkungan masyarakat dan mencapai tujuan masyarakat (Sany, 2019). Dengan demikian masyarakat harus mampu bekerja dan membantu satu sama lain untuk memaksimalkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri.

Bekerja adalah segala sesuatu usaha yang dilakukan manusia atau individu secara maksimal, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif untuk diri dendiri atau orang lain dengan menerima gaji (Utami, 2020). Dalam Firman Allah:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: "*Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dibumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung*" (**QS. Al-Jumuah:10**)

Di dalam surah tersebut dijelaskan bahwasannya pengertian pekerjaan baik menurut syariah atau menurut ekonomi mengcangkup setiap tenaga yang dikeluarkan oleh manusia, dengan mendapatkan upah atau harta dengan tenaga jasmani. Oleh karena itu bekerja dibutuhkan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang terbaik di muka bumi dan untuk mencapai karunia Allah *Subbhanahuwata'ala* (Utami, 2020).

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang adalah kesejahteraan warga negaranya. Kesejahteraan telah menjadi bagian penting dari sebuah negara, bahkan dibentuknya sebuah negara adalah dalam rangkan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai cara, metode, aturan, alat, pendekatan, ataupun kebijakan telah dipilih dan dilakukan oleh sebuah negara dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut (Purwana, 2014).

Bebagai nilai dan institusi sosial dapat menjadi instrument bagi terciptanya kehidupan yang lebih baik dan teratur. Negara dibutuhkan dan didirikan untuk mewujudkan ketertiban dan kehidupan yang lebih baik (Purwana, 2014). Oleh karena itu kesejahteraan menjadi tujuan setiap orang, masyarakat, bahkan setiap negara. Kondisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sejahtera menjadisesuatu hal yang diidealkan (Dewi, 2014). Purwana (2014) menjelaskan dalam perspektif ide atau gagasan, konsep kesejahteraan banyak mengadopsi pada paham kapitalisme dan sosialisme. Paham ini telah terbukti membawa banyak kegagalan dalam mengantarkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, munculah sebuah alternatif konsep kesejahteraan yang mengacu pada nilai-nilai ajaran syariat Islam. Pada saat krisis ekonomi moneter melanda dunia, lembaga-lembaga ekonomi di negara berkembang yang menerapkan mekanisme syariah terbukti dapat bertahan dan mampu untuk dapat tumbuh berkembang. Sehingga berawal dari keberhasilan itu mulailah banyak tokoh mengkaji

tentang konsep kesejahteraan yang berlandaskan pada ekonomi islam (Purwana, 2014).

Peran pemerintah dengan adanya BUMDes di desa-desa Kabupaten Bantul lebih lanjut sangat di harapkan guna pengembangan atas apa yang telah ada, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 disebutkan bahwa pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMdes yang ada, agar tetap dapat berproduksi dan tetap mampu menjadi sumber penggerak perekonomian masyarakat sekitar desa. Jika melihat bahwa keberadaan BUMDes yang ada di Desa Panggung Lestari Kec. Sewon bahwa keberadaan beberapa BUMDes tersebut berada pada kegiatan yang stagnan. Menurut data dari Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dalam *website* resmi Kabupaten Bantul dari 75 Desa di Kabupaten Bantul hanya ada 9 Desa yang dapat mengembangan dan melestarikan BUMDes yang dimiliki desa tersebut, diantaranya Desa Tirtonirmolo Kasihan, Desa Argorejo Sedayu, Tirtohargo dan Tirtosari Kretek, Desa Sumberagung Jetis, Desa Panggungharjo Sewon, Desa Sendangsari Pajangan, Gadingsari Sanden dan Desa Sidomulyo Bambanglipuro. Hal ini diakibatkan kurangnya perhatian dari pemerintah desa setempat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kesadaran dan tritmen bagi pengelola BUMDes tersebut agar kembali pada kegiatan awal dari BUMDes sehingga peningkatan kualitas BUMDes dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat desa.

Maka dari itu peran pemerintah dalam hal ini Pemkab Bantul untuk membina dan mengawasi BUMDes yang ada akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dan upaya yang diambil untuk menyelesaikan kendala tersebut dalam hal melakukan pembinaan, pengawasan, serta kesejahteraan terhadap desa pengelola BUMDesa di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

Dari berbagai masalah diatas peneliti tertarik untuk menginvestifigasi penelitian yang berjudul **"Analisis Pengembangan BUMDes Oleh Kepala BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BUMDes Panggung Lestari Kec. Sewon Kab. Bantul"** mengingat apakah tujuan BUMDes untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sudah sepenuhnya terlaksana dengan menggunakan landasan perspektif ekonomi islam.

B. Identifikasi Masalah

Masyarakat belum mampu menyesuaikan diri dengan adanya BUMDes dikarenakan masyarakat kurang memiliki skill dalam bidang memanajemen dan tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung untuk menjalankan kegiatan BUMDes. Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa ini sangat mendorong masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dan memenuhi pelayanan kepada masyarakat untuk menggerakan aset-aset ekonomi desa.

Dampak kemiskinan yang terjadi di Indonesia sebagai negara berkembang juga turut melatar belakangi masalah pada penelitian ini. Ditinjau dari survei peneliti di Desa Panggungharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul masih ada sebesar 276 kepala keluarga yang tergolong sebagai masyarakat miskin (tidak mampu) yang diukur dengan beberapa kriteria meliputi, letak rumah, besar rumah, tinjauan penghasilan kepala keluarga, dan pengeluaran kepala keluarga pada setiap bulannya. Dampak *Covid-19* juga turut melatar belakangi adanya permasalahan penelitian ini. Menurut Kepala Desa Panggungharjo tercatat ada 40% warga yang terdampak adanya pandemi ini.

Adanya BUMDes diharapkan mampu untuk menanggulangi beberapa masalah yang terjadi. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan kondisi yang terjadi, karena usaha yang dijalankan oleh BUMDes diharapkan mampu menggali potensi masyarakat atau partisipasi masyarakat agar masyarakat dapat terus *suvive* terhadap kondisi ekonomi yang sedang digempur oleh berbagai permasalahan.

C. Rumusan Masalah

Agar dalam pembahasannya lebih terarah dan terperinci dalam melakukan proses penelitian, maka peneliti perlu membuat rumusan-rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Pengembangan BUMDes Panggung Lestari Dalam Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam?

D. Tujuan Masalah

Tujuan masalah sebenarnya merupakan harapan atau mengetahui sesuatu yang akan dicapai yang dapat dijadikan arahan apa saja yang telah dilakukan dalam penelitian, adapun tujuan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi Pengembangan BUMDes Panggung Lestari dalam mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat dalam pandangan perspektif Ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagi berikut:

1. Penelitian ini diharapkan menambah informasi,wawasan serta ilmu dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca khususnya mengenai ilmu ekonomi tentang strategi pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) Panggung Lestari untuk kesejahteraan masyarakat dalam perspektif islam.
2. Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi penulis tentang strategi, pengembangan dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif islam. Dan untuk pembaca skripsi ini bisa sebagai pedoman untuk penelitian dan generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, *13*(1), 67–81. https://doi.org/25485644

Anton, P., Rumate, V. A., & Maramis, M. T. . (2019). Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *19*(02), 131–140.

Bogdan, R., & Taylor, S. J. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., & Kiyai, B. (2013). Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepualauan Talaud. *Journal " ACTA DIURNA " Edisi April 2013*, *walfare*, 1–23.

Dewi, A. S. K. (2014). *SE B AGAI UP AYA DAL AM M E NINGKAT KAN P E NDAP AT AN ASL I DE SA (P AD es) SE RT A MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DESA*. *V*(1), 1–14.

Kamal, A. H., & Wulandari, S. (2018). Pengaruh Lokasi, Pelayanan, Dan Prosedur Pencairan Pembiayaan Terhadap Keputusan Anggota Koperasi Mengambil Pembiayaan. *Iqtisad*, *5*(1), 109. https://doi.org/https://doi.org/10.31942/iq.v5i1.2212

Kirowati, D., & Setia, L. D. (2018). PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus :Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, *1*(1), 15–24. https://doi.org/10.32486/aksi.v2i1.213

Kurnia, A., & Insani, S. (2020). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH MELALUI PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH). *Journal of Chemical Information and Modeling*, *3*(1), 168–169.

Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. *El-Riyasah*, *11*(1), 67–83.

Prasetyo, A., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, *13*(1), 16–31. https://doi.org/10.37378/jd.2015.1.16-31

Prasetyo, R. A. (2016). "Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan ... *Jurnal Dialektika Volume*, *XI*(1), 86–100.

Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam Islam. In *Justitia Islamica* (Vol. 11, Issue 1, pp. 21–42).

Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, *1*(6), 1068–1076.

Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(3), 424–440. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314

Rochmah, S., & Sukmana, R. (2019). PENGARUH FAKTOR-FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAPISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX (IHDI) DI INDONESIA TAHUN 2013-2017. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Salam, A., & Risnawati, D. (2019). Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, *8*(2), 96. https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(2).96-106

Sany, U. P. (2019). Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur’an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, *39*(1), 32. https://doi.org/10.21580/jid.v39.1.3989

Sujono, R. I., & Wibowo, F. W. (2020). MARKETING MIX DAN TINGKAT

MARGIN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBIAYAAN PADA NASABAH BANK SYARIAH Rusny Istiqomah Sujono 1 , Febrian Wahyu Wibowo 2 1,2. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah Volume*, *8*(1), 37–51.

Susilo, A. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(2), 193–209. https://doi.org/10.22219/jes.v1i2.3681

Utami, P. (2020). Prinsip Produksi Bolu pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dwi Putra Palembang Perspektif Ekonomi Islam. *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian …*, *1*, 29–46. http://ejournal.steialfurqon.ac.id/index.php/adl/article/view/5

Waluyo, B. (2016). Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *2*(2), 188–206.

Yunadi, A. (2011). Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas Terhadap Permintaan Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, *1*(2), 2.

Yunadi, A. (2020). *Maqasid as-Syari ' ah dan Asuransi Syari ' ah*. *X*, 159–172.